

RINGKASAN

**Ulan Satika 220510129 Analisis Putusan Banding Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah (Studi Putusan Nomor: 27 Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M & Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H)**

Tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam, khususnya dalam tata niaga komoditas timah, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang luas. Kasus tata niaga komoditas timah yang diputus dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI menjadi perhatian publik karena melibatkan praktik penyalahgunaan kewenangan, perolehan keuntungan secara melawan hukum, serta dampak ekologis yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim, mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan banding, serta menganalisis pengaturan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan timah ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah gagal menerapkan unsur-unsur tindak pidana korupsi melalui pembuktian unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, serta unsur kerugian keuangan negara.. Majelis hakim menilai para terdakwa secara sadar membangun dan memfasilitasi skema tata niaga timah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan masuknya hasil pertambangan ilegal ke dalam rantai pasok resmi dan mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam putusan banding, majelis hakim memperberat pidana terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, besarnya kerugian negara, serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif dan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kerugian lingkungan telah diakui sebagai bagian dari kerugian negara, pengaturan tanggung jawab

pemulihan lingkungan hidup dalam putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Putusan banding tidak secara eksplisit memerintahkan pelaksanaan pemulihan lingkungan maupun mengatur mekanisme penggunaan uang pengganti untuk rehabilitasi kawasan yang rusak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim hukum tindak pidana korupsi dan hukum lingkungan hidup agar pemulihan keuangan negara dapat berjalan seiring dengan pemulihan fungsi ekosistem yang terdampak akibat kegiatan pertambangan ilegal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Tata Niaga Komoditas Timah, Putusan Banding, Kerugian Negara, Pemulihan Lingkungan Hidup.

SUMMARY

**Ulan Satika 220510129 Analisis Putusan Banding Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah (Studi Putusan Nomor: 27 Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M & Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H)**

Corruption in the natural resources sector, particularly in the governance and trading system of tin commodities, constitutes a form of crime that not only causes substantial financial losses to the state but also results in extensive environmental degradation. The tin commodity trading case adjudicated in Decision Number 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI attracted significant public attention due to its involvement of abuse of authority, unlawful enrichment, and considerable ecological impacts. This study aims to analyze the application of the elements of corruption in the tin commodity trading system as considered by the panel of judges, examine the legal reasoning employed by the appellate court judges, and evaluate the regulation of environmental restoration liability arising from illegal tin mining from the perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the case approach. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation and the Decision of the Jakarta High Court Number 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, secondary legal sources including books, scholarly journals, and previous research, as well as tertiary legal sources such as legal dictionaries and other supporting references. The collected legal materials were analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method to obtain a comprehensive understanding of the legal issues examined in this study.

The findings indicate that the panel of judges appropriately applied the elements of corruption by proving the elements of unlawfulness, self-enrichment or enrichment of another person or corporation, abuse of authority, opportunity or means due to position or office, and state financial losses. The judges concluded that the defendants knowingly established and facilitated a tin trading scheme that violated prevailing mining and commercial regulations, thereby enabling illegally mined tin to enter the official supply chain and causing substantial state financial losses. At the appellate level, the court imposed harsher penalties by considering the degree of culpability, the magnitude of state losses, and the social impacts resulting from the criminal conduct. Accordingly, the appellate decision reflects an effort to achieve substantive justice and strengthen the deterrent effect of anti-corruption law enforcement.

The study further reveals that although environmental losses were recognized as part of the state's losses, the regulation of environmental restoration liability in the decision has not fully reflected the principles of environmental recovery stipulated under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The appellate judgment did not explicitly order

environmental restoration measures nor establish a mechanism for allocating compensation payments toward ecosystem rehabilitation. Therefore, harmonization between the anti-corruption legal regime and environmental law is necessary to ensure that the recovery of state financial losses is accompanied by the restoration of environmental functions damaged by illegal mining activities.

Keywords: *Corruption Crime, Tin Commodity Trading, Appellate Decision, State Financial Losses, Environmental Restoration.*